



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh

**Rengki Ramang Hartono
NIM 120810301060**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Rengki Ramang Hartono
NIM 120810301060**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Ibu Eny Suhartik dan Bapak Gatot Hartono;
3. Kakak kandung Fendika Fendiari;
4. Dosen Pembimbing saya Andriana SE, M.Sc., Ak dan Kartika SE, M.Sc., Ak.
5. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap

(Q.S. Al Insyirah: 5-8)

Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan.

Douwes Dekker

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rengki Ramang Hartono

NIM : 120810301060

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul "PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2016

Yang menyatakan,

Rengki Ramang Hartono

NIM. 120810301060

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD
Kabupaten Jember)"

Nama Mahasiswa : Rengki Ramang Hartono

N I M : 120810301060

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 22 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Andriana, SE, M.Sc

NIP 19820929 201012 2002

Kartika, SE, M.Sc

NIP 19820207 200812 2002

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)

Oleh:

Rengki Ramang Hartono

NIM. 120810301060

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Andriana, SE,M.Sc

Dosen Pembimbing II : Kartika,SE,M.Sc

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rengki Ramang Hartono

NIM : 120810301060

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

7 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni S.E., M.Sc., Ak (.....)
NIP. 198306242006042001

Sekretaris : Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 198207232005011002

Anggota : Drs.Imam Mas'ud , M.M., Ak. (.....)
NIP. 195911101989021001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Rengki Ramang Hartono

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Sederhana dan Metode *Moderated Regression Analysis* (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan semakin tinggi tingkat komitmen organisasi akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kata kunci: Pengetahuan dewan tentang anggaran, Komitmen Organisasi, Pengawasan keuangan daerah (APBD).

Rengki Ramang Hartono

Accounting Depaertment, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research was intended to know the effect of The Influence of the Knowledge of the Board About the Budget Against Financial Supervision the Council Area (BUDGETS) and Moderating Variable of Organizational Commitment (Empirical Studies on County Jember).this research used primary data which was obtained from the respondents through questionnaires which were used in the research. The data analysis method used descriptive statistic, data quality test, classic assumption test, and hypothesis testing which consisted of Simpel linear regression analysis method and Moderated Regression Analysis (MRA), F test, coefficient of determination, and also t test. The research result showed that the Knowledge of the Board and Organizational Commitment gave positive result on the Budget Against Financial Supervision the Council Area (BUDGETS). This case caused the higher

Key words; the Knowledge of the Board, Organizational Commitment, the Budget Against Financial Supervision the Council Area (BUDGETS)

RINGKASAN

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember). Rengki Ramang Hartono; 120810301060; 2016; 62 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pengawasan APBD secara maksimal dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lingkup pembangunan satu wilayah. Pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan maupun lainnya membutuhkan penilaian secara bijak dari pemerintah agar dalam penyusunan anggaran sesuai dengan realisasinya. Dengan Otonomi daerah proyek pembangunan wilayah dapat di *handdle* penuh oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat rawan terhadap kepentingan kelompok yang memanfaatkan anggaran sebagai umpan untuk tindakan berbagai kecurangan. Keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan anggaran daerah sebagai controlling yang benar dan memberikan kontribusi untuk upaya mewujudkan pemerintah daerah yang terbuka.

Pengetahuan anggaran sangat diperlukan untuk pengawasan APBD dapat terlaksana secara terbuka. Anggota dewan harus mampu memahami substansi dan arah kebijakan yang terdapat dalam APBD. Yudoyono dalam Pramita (2010) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran yang cukup seperti konsep penyusunan, pengesahan, pelaksanaan serta tahap evaluasi dan pelaporan anggaran. Pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki anggota dewan dapat digunakan dalam menganalisis perbandingan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBD.

Kinerja anggota dewan dalam pengawasan APBD dapat terwujud secara optimal jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi. Menurut Robbins (2014) Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual saat menjalankan operasional organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membuktikan seberapa penting komitmen organisasi bagi anggota dewan.

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Jember. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Jember bagian anggaran. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu anggota DPRD Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuisisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga dengan adanya pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah (APBD) akan berjalan semakin baik.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. H. M. Fathorrozi, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Andriana, SE,M.Sc dan Kartika,SE,M.Sc selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi.
8. Ibu, bapak, mas Fendika Fendiari dan keluargaku yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Adik Tingkat Tercinta Dini Eka Permatasari yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa;
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Dwi Prasetyaningsih, Vita Sidiyanti dan Intan Permatasari Putri Aditya yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-Teman Yogi, Erik, Rizal, Faisal, Joe, Banda, Bintang, Ikko, Ajay, Putut, Angga, Adit, Wisnu, Zaki, Tomy yang selalu memberi semangat.
12. Kawan-kawan pejuang skripsi Azil, Lila, Hesti, Yola, Dhika Elvira, Puput, Luluk, Aulia yang selalu memberi arahan dan saran.
13. Sahabat-sahabatku dari SD, SMP dan SLTA di Ambulu Bagus, Dewi, Ida, Suhul, Bima, Lintang, Eva, Alim.
14. Guru-guruku dari TK, SD, SMP dan SLTA yang sudah mengajarkanku selama ini.
15. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik di HMJA yang telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi.
16. Keluarga KKN 21 Niko, Arga, Lutfi, Azalia, Tissa, Linda, Vidya, Lisa, Puput.
17. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas jember
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Keagenan	6
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
2.1.3 Laporan Keuangan Daerah.....	7
2.1.4 Fungsi dan Tugas DPRD.....	10
2.2 Tinjauan Konsep	13
2.2.1 Pengawasan Keuangan Daerah	13
2.2.2 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	16
2.2.3 Komitmen Organisasi	17
2.3 Penelitian Terdahulu	18
2.4 Perumusan Hipotesis	21
2.5 Kerangka Penelitian	23

BAB 3. METODE PENELITIAN

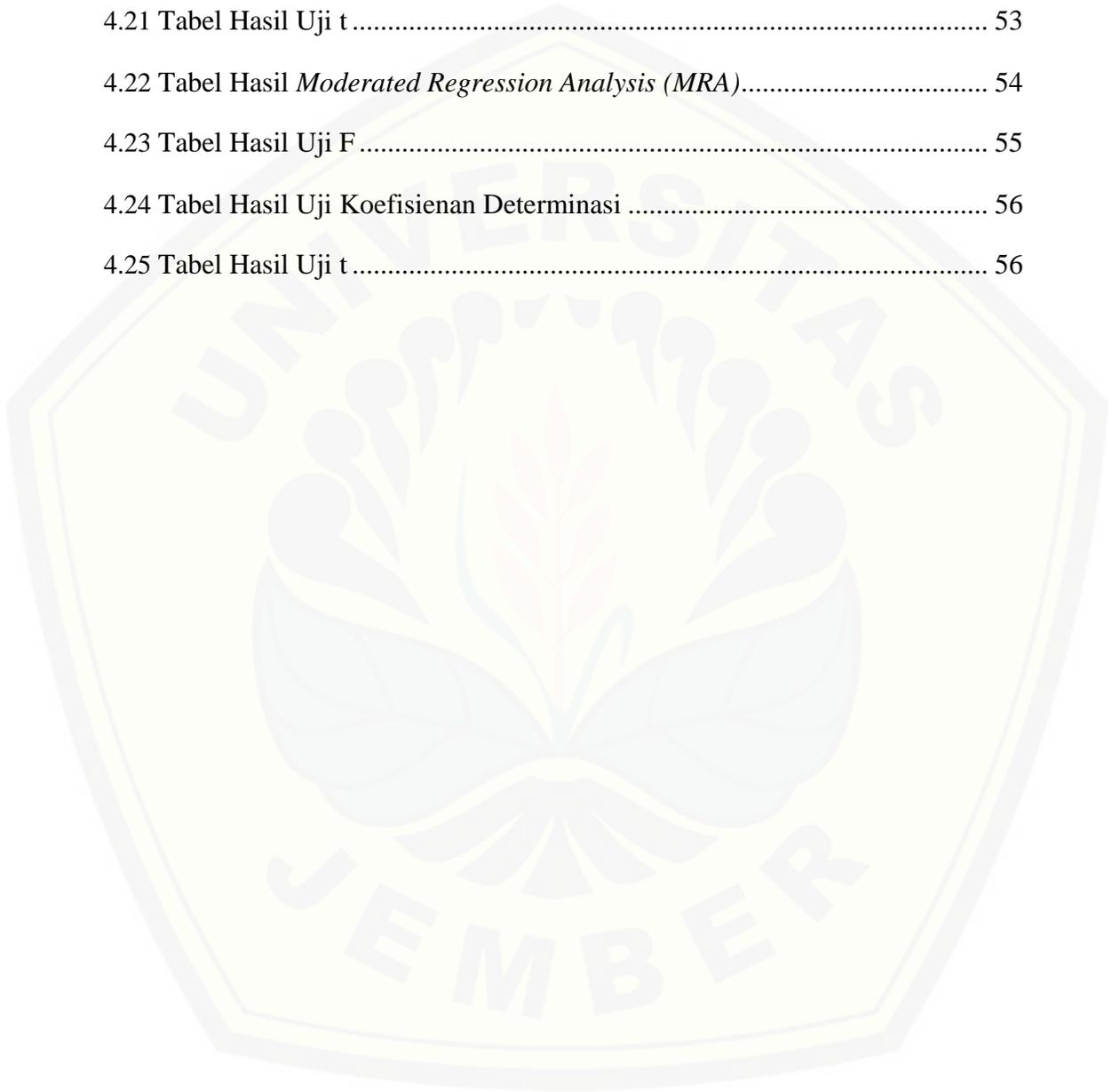
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Tempat dan Waktu	24
3.3 Populasi dan Sampel	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	26
3.6.1 Variabel Penelitian	26
3.6.2 Definisi Operasional.....	27
3.7 Analisis Data	29
3.7.1 Statistik Deskriptif	29
3.7.2 Uji Kualitas Data	30
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.7.4 Pengujian Hipotesis	32
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	35

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Deskriptif	36
4.1.1 Deskriptif Data Responden.....	37
4.1.2 Deskriptif Jawaban Responden.....	41
4.2 Pengujian Instrumen	46
4.2.1 Uji Validitas.....	46
4.2.2 Uji Reliabilitas	48
4.3 Uji Asumsi Klasik	49
4.3.1 Uji Normalitas	49
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	49
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	50
4.4 Pengujian Hipotesis	51
4.4.1 Analisis Regresi Sederhana	51
4.4.2 <i>Moderated Regression Analysis(MRA)</i>	54
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	57
4.5.1 Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	57
4.5.2 Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	58
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

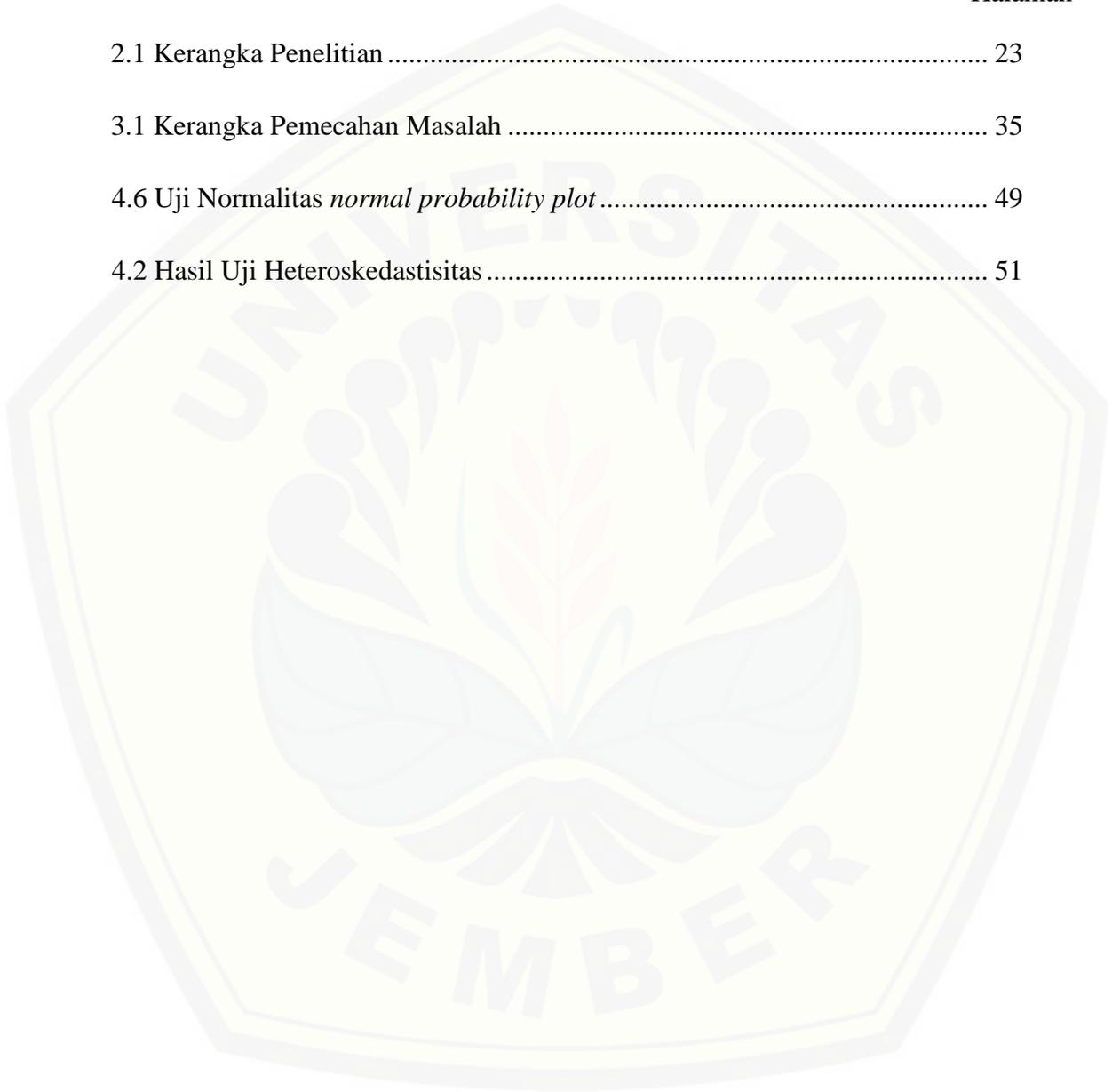
	Halaman
1.1 Tabel Data APBD TA 2015 Karesidenan Besuki.....	4
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
4.1 Tabel Distribusi Kuisisioner	36
4.2 Tabel Jenis Kelamin.....	38
4.3 Tabel Tingkat Usia Responden.....	38
4.4 Tabel Jabatan Responden.....	39
4.5 Tabel Komisi.....	38
4.6 Tabel Fraksi	40
4.7 Tabel Periode Jabatan	41
4.8 Tabel Pendidikan Responden.....	41
4.9 Tabel Kategori Rata-rata Jawaban Responden	42
4.10 Tabel Kategori Rata-rata Jawaban Responden X	42
4.11 Tabel Kategori Rata-rata Jawaban Responden Z.....	43
4.12 Tabel Kategori Rata-rata Jawaban Responden Y	44
4.13 Tabel Hasil Uji Validitas Variabel X	46
4.14 Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Z.....	47
4.15 Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Y	47
4.16 Tabel Hasil Uji Reliabilitas	48
4.17 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
4.18 Tabel Hasil Analisis Regresi Sederhana	51

4.19 Tabel Hasil Uji F	52
4.20 Tabel Hasil Uji Koefisienan Determinasi	53
4.21 Tabel Hasil Uji t	53
4.22 Tabel Hasil <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	54
4.23 Tabel Hasil Uji F	55
4.24 Tabel Hasil Uji Koefisienan Determinasi	56
4.25 Tabel Hasil Uji t	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	23
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	35
4.6 Uji Normalitas <i>normal probability plot</i>	49
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Permohonan Bantuan Pengisian Kuisisioner.....	1
2. Kuisisioner Penelitian.....	1
3. Statistik Deskriptif Data Responden.....	2
4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	2
5. Uji Kualitas Data	3
6. Uji Asumsi Klasik.....	5
7. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	6
8. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	6
9. Rekapitulasi Jawaban Responden dan Data Responden	7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengurusan keuangan dipemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran (Halim, 2014 : 35)

Menurut UU No. 23 tahun 2014 mengenai tugas DPRD dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Mayasari, 2012). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah komitmen organisasi.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan indikator pemerintahan yang demokratis guna upaya membangun ekonomi kerakyatan. Adanya komitmen organisasi dalam pengawasan APBD merupakan indikator mewujudkan *good governance*. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi sangat perlu untuk pengawasan APBD yang baik Pengawasan yang dilakukan harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, pengesahan, pelaksanaan serta pelaporan. Hal ini karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD (RKUA). Namun anggota

DPRD harus memahami bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah sebatas pengawasan bukan pemeriksaan.

Pengawasan APBD secara maksimal dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lingkup pembangunan satu wilayah. Pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan maupun lainnya membutuhkan penilaian secara bijak dari pemerintah agar dalam penyusunan anggaran sesuai dengan realisasinya. Dengan Otonomi daerah proyek pembangunan wilayah dapat di *handle* penuh oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat rawan terhadap kepentingan kelompok yang memanfaatkan anggaran sebagai umpan untuk tindakan berbagai kecurangan. Keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan anggaran daerah sebagai *controlling* yang benar dan memberikan kontribusi untuk upaya mewujudkan pemerintah daerah yang terbuka.

Pengetahuan anggaran sangat diperlukan untuk pengawasan APBD dapat terlaksana secara terbuka. Anggota dewan harus mampu memahami substansi dan arah kebijakan yang terdapat dalam APBD. Yudoyono dalam Pramita (2010) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran yang cukup seperti konsep penyusunan, pengesahan, pelaksanaan serta tahap evaluasi dan pelaporan anggaran. Pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki anggota dewan dapat digunakan dalam menganalisis perbandingan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBD.

Kinerja anggota dewan dalam pengawasan APBD dapat terwujud secara optimal jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi. Menurut Robbins (2014) Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual saat menjalankan operasional organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik.

Penelitian Pramita dan Andriyani (2010), menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengetahuan anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif, pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh positif, pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian oleh Kinasih (2013), menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengetahuan anggaran dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Penelitian ini merupakan kolaborasi dari penelitian Pramita (2010) dan Kusumawati (2014) dengan membandingkan analisis menurut sampel dewan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada variabel moderat komitmen organisasi. Karena moderating komitmen organisasi berhubungan secara langsung terhadap kualitas anggota dewan dalam pengawasan APBD. Objek penelitian ini adalah anggota dewan kabupaten Jember. APBD Kabupaten Jember TA 2015 sebesar 3,03 Triliun, sehingga menjadi daerah dengan APBD terbesar dikaresidenan Besuki. Besarnya APBD Kabupaten Jember membutuhkan pengawasan anggota dewan yang lebih bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Tabel 1.1 Data APBD TA 2015 Karesidenan Besuki

No	Kabupaten	APBD 2015
1	Banyuwangi	Rp.2.394.403.000.000
2	Bondowoso	Rp.1.577.181.000.000
3	Jember	Rp.3.033.788.000.000
4	Lumajang	Rp.1.667.403.000.000
5	Situbondo	Rp.1.465.892.000.000

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan APBD?
2. Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD).
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD)?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD

terhadap pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).

2. Bagi partai politik dapat dijadikan sebagai acuan pada saat merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai.
3. Bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara manager dengan pemegang saham. Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan agensi dapat tercipta karena adanya kontrak antara principal (pemegang saham dan penyedia hutang) dengan Agent (manajer) untuk melakukan pelayanan kepada pemilik perusahaan (Godfrey 2010, 362). Di dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal*. Dalam hubungannya dengan rakyat, pihak legislatif adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat (*principal*), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif (Halim dan Kusufi, 2006)

Konteks Teori agensi biasanya dianggap sebagai pihak yang memaksimalkan dirinya tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil (*outcome*) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen. pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Suwardjono, 2010: 485).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan daerah

Halim (2013:180) menyatakan bahwa setelah lima tahun mengupayakan berbagai usaha reformasi di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dimaksud, pada tahun 2003 dihasilkan satu paket perundangan-undangan yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang yang terkait dengan ketiga undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, kemudian menyusul seperti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan *bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).*

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut

berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
 - b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan
 - b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
 - c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
 - d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas

2.1.4 Fungsi dan Tugas DPRD

a. Fungsi DPRD

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 365 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

b. Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 366 tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Tinjauan Konsep

2.2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD pasal 100 dan 153 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD

provinsi/kabupaten/kota. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah.

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek pengawasan, sifat pengawasan, dan metode pengawasan. (Erlina, 2015: 19)

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih focus pada kegiatan pengumpulan sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

3. Pengawasan menurut metode

Menurut metode, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui perlembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan.

Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) yang menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan secara rutin dan usaha-usaha pembangunan (Mardiasmo, 2004: 78), sebagai berikut:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh pengawas terhadap bawahannya dalam unit kerjanya. Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaannya atau gambaran tentang organisasinya adalah tanggung jawab pemimpin organisasi. Setiap pimpinan lembaga pemerintah atau unit kerja structural dan fungsional seperti *project team*, komite, kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab. Jika mereka menemukan tindakan-tindakan yang menyimpang, mereka akan melakukan tindakan koreksi dan selalu memertahankan *good performance*.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang kewajiban utamanya adalah mengawasi seperti Unit Pengawasan Internal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Jendral Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Pengawasan legislatif

Pengawasan legislative merupakan tugas pengawasan yang dijalankan oleh DPR dan DPRD. Berdasarkan UUD 1945, DPR memiliki kewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

4. Pengawasan hukum

Pengawasan hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). MA memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjalankan pengawasan atas pemerintah dalam bidang perundang-undangan.

5. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti media massa, LSM, ormas dan lain-lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses perencanaan, penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD serta tahap pertanggungjawaban APBD. Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar DPRD. Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Yudoyono dalam Kusumawati 2014)

2.2.2 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002). Kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi banding ke tempat lain.

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia adalah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan aspek-aspek seperti:

1. Pengembangan dan kemampuan melaksanakan tugas dan peraturan sebagai aparatur pemerintah, sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan mampu mengambil keputusan secara mandiri dan professional
2. Peningkatan motivasi, disiplin, kejujuran, etos kerja, dan rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh semangat jiwa pengabdian.

3. Perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada berkembangnya keterbukaan, sikap melayani dan mengayomi politik sebagai tugas dan tanggung jawab pokoknya.

Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

2.2.3 Komitmen Organisasi

Wiener dalam Amelia Veronika (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang

keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena pada dasarnya komitmen organisasi yang muncul bukan hanya kesetiaan organisasi tetapi merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan perlu ditumbuhkan mengingat sebagian besar anggota dewan merupakan bagian dari anggota partai politik (Pramita dan Andrayani, 2010).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating (Mayasari,2012)	1.Kualitas Anggota Dewan 2.Akuntabilitas Publik 3.Partisipasi Masyarakat 4.Transparansi Kebijakan Publik	Kualitas anggota dewan,akuntabilitas Publik,Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Dan Transparasi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan APBD
2	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	1.Pengetahuan Dewan 2.Komitmen Organisasi,	Pengetahuan Dewan tentang

	<p>Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Study Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar) (Kusumawati,2014)</p>	<p>3.Akuntabilitas, 4.Partisipasi Masyarakat, 5.Transparansi Kebijakan Publik</p>	<p>Anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dan Komitmen Organisasi,Akuntabilitas Publik,Partisipasi Masyarakat,Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD</p>
3	<p>Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Pati Dan Jepara). (Pradani, 2014)</p>	<p>1.Pengetahuan Dewan 2.Komitmen Organisasi 3.Akuntabilitas 4.Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Pengetahuan Dewan tentang Anggaran,Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat, berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh</p>

4	<p>Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Dprd Kabupaten Karanganyar Dan Sragen) (Kristina, 2012)</p>	<p>1.Pengetahuan Dewan 2.Komitmen Organisasi 3.Akuntabilitas 4.Transparansi Kebijakan Publik</p>	<p>Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Akuntabilitas berpengaruh positif ,Komitmen Orgnisasi berpengaruh negatif sedangkan Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD</p>
5	<p>Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Kabupaten Sragen) (Kinasih, 2013)</p>	<p>1.Pengetahuan Dewan 2.Komitmen Organisasi</p>	<p>Pengetahuan tentang Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD</p>

6	<p>Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu) (Pramita dan Andriyani, 2010)</p>	<p>1. Pengetahuan Dewan 2. Komite Organisasi 3. Akuntabilitas 4. Partisipasi Masyarakat 5. Transparansi Kebijakan Publik</p>	<p>Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dan Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD</p>
---	--	--	---

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Wahyuningsih, 2014).

Apabila anggota dewan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik terutama fungsi pengawasan APBD (Mayasari, 2012).

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Sopanah dan Wahyudi, 2007 ; Mayasari, 2012 ; Wahyuningsih, 2014). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Adanya pengetahuan tentang anggaran, anggota dewan diharapkan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah

2.4.2 Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran agar menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Chong dan Chong, 2002 dalam Pramita dan Andriyani, 2010)

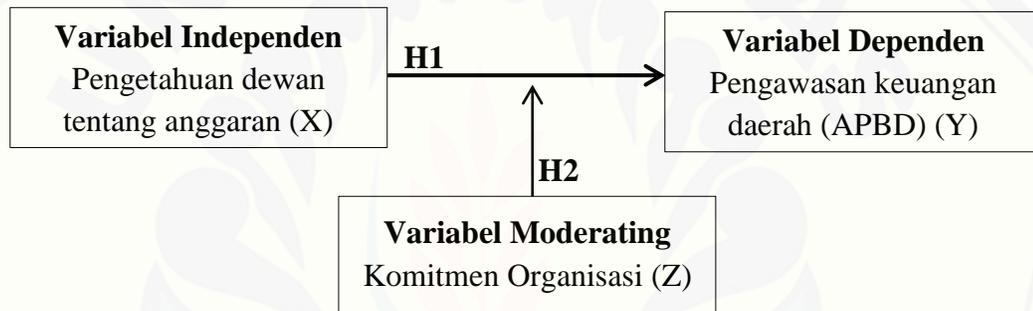
Psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan ini sangatlah penting karena mengingat anggota dewan pada umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dan pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini sangatlah perlu untuk dimiliki anggota dewan guna pengawasan APBD yang baik (Kusumawati, 2014).

Penelitian Andriyani dan Kinasih (2013) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian hipotesis di atas, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2014:130). Desain penelitian harus sesuai dengan metode yang dipilih. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: Individu, organisasional, industri atau perspektif orang lain (Indriantoro dan Bambang, 2014:88)

Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2012:308). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: metode survey dan metode observasi. Unit analisis penelitian ini yaitu pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Jember. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Jember. Waktu yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah satu bulan

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014: 115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yaitu sebagian dari elemen-elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember yang berjumlah 50 anggota. Sedangkan dalam memilih sampel, peneliti menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgement Sampling*) yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2014: 130). Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Jember bagian anggaran yang berjumlah 30 anggota. Penelitian yang dilakukan oleh (Mayasari, 2012 ;Sudiarta, Sulindawati dan Sujana, 2014) menunjukkan anggota dewan bagian anggaran memiliki tingkat pengetahuan anggaran yang cukup guna pengawasan APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran digunakan sebagai landasan dalam melakukan pengawasan serta dapat mendeteksi dan mengurangi praktek kecurangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian/responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:146)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari anggota dewan atau data yang terjadi di lapangan penelitian, dan kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014:145).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa angket/kuesioner pengembangan dari kuesioner penelitian Sopanah dan Pramita

(2010). Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. (Indriantoro dan Bambang, 2014:152)
- b. Kuesioner, teknik kuesioner memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. teknik kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden (Indriantoro dan Bambang, 2014:154). Responden dalam penelitian ini adalah anggota dewan Kabupaten Jember.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:63), Tipe-tipe variable dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu: Variabel Independen (Independent Variable), Variabel dependen (Dependent Variable) dan Variabel Moderating (Moderating Variable).

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (Y)

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X)

3. Variabel Moderating

Variabel moderating yaitu variabel yang mempengaruhi (menguatkan atau melemahkan) hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel pemoderasi yaitu komitmen organisasi (Z)

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Indriantoro dan Bambang (2014: 61) menjelaskan yang disebut variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan tahapan yang memberi dampak terhadap keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan

dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Variabel pengawasan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Pramita (2010). Instrumen tersebut berisi sebelas butir pertanyaan yang mengukur pengawasan keuangan daerah dengan indikator yaitu: pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan, pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok (Kusumawati, 2014)

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Pramita (2010). Instrumen tersebut berisi tujuh butir pertanyaan yang mengukur pengetahuan dewan tentang anggaran dengan indikator yaitu: mengetahui tata cara pelaksanaan APBD, memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait, mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja. Individu mengidentifikasi dirinya pada suatu organisasi tertentu tempat individu tersebut bekerja dan berharap untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi kerja (Pramita dan Andriyani, 2010)

Variabel komitmen organisasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Pramita (2010). Instrumen tersebut berisi lima butir pertanyaan yang mengukur komitmen organisasi dengan indikator yang menyangkut tiga sikap yaitu: rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, rasa kesetiaan pada organisasi. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3.7 Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik

3.7.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Bambang (2014:170), statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya

digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti jenis kelamin, jabatan, fraksi, periode kerja, strata pendidikan dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir tersebut dinyatakan valid (Suyoto, 2011:73-75).

2. Uji Reliabilitas

Siregar (2013:55) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *One shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi secara normal. Dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas, yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal (Santoso, 2015: 49).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linear dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013: 25).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara lain prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2015: 62)

3.7.4. Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Bambang (2014: 202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis)

Berikut uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Analisis Regresi

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi dengan menggunakan program SPSS. Alat analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-m

asing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dimana koefisien regresi ini bertujuan untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah

a. Pengujian hipotesis 1 menggunakan analisis regresi sederhana

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

X = Pengetahuan dewan tentang anggaran

e = error

b. Pengujian Hipotesis 2 menggunakan *Modarated Regression Analysis (MRA)*

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X = Pengetahuan tentang Anggaran

Z = Komitmen Organisasi

XZ = Interaksi Pengetahuan Dewan dengan Komitmen Organisasi

e = error

Adapun dari hipotesis yang diterima apabila angka signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, dan jika angka > 0.05 maka H_0 diterima

b. Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ghozali, 2013:84)

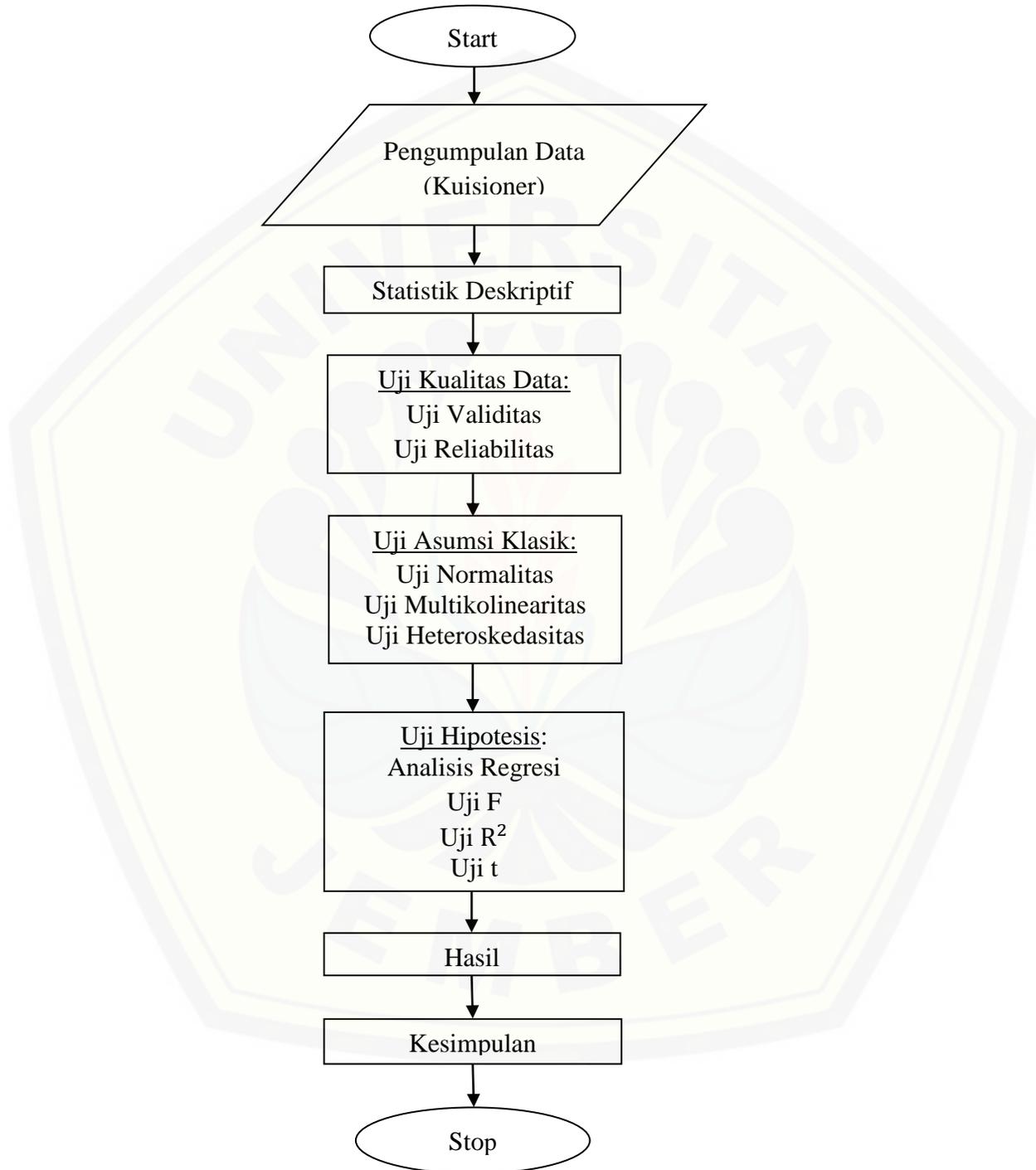
c. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Ghozali, 2013: 169)

d. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan ketentuan: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_0 ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_0 diterima (Ghozali, 2013:84).

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Hasil pengujian H2 menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Ini membuktikan bahwa komitmen organisasi anggota dewan kabupaten Jember yang berasal dari partai tetap berkomitmen dan loyalitas.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah

1. Kurangnya referensi yang ada pada gambaran umum lembaga DPRD Jember. Hal ini dikarenakan data profil kantor DPRD Jember bersifat tertutup.
2. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sample* dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, dimana kelemahan dari teknik ini adalah kurang representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum, atau hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

3. Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasi hanya memiliki nilai signifikansi sebesar 26,8% terhadap pengaruh pengawasan keuangan daerah (APBD)
4. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel dependen kinerja pengawasan anggota dewan terhadap pengawasan APBD

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mencari referensi mengenai gambaran umum lembaga DPRD tidak hanya melalui sekretaris dewan melainkan melalui website DPRD dan media lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian misalnya DPRD Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Bondowoso serta DPRD Kabupaten Banyuwangi dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel-variabel moderating lainnya seperti gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel dependen lainnya seperti kinerja anggota dewan pada saat penyusunan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, 7th ed.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Godfrey, Jeyne, Tarca, Hamiton dan Holmes (2010), *Accounting Theory, 7th ed.*, John Wiley & Sons, Inc. (GHT)
- Halim dan Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadin, 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Genta
- Hariadi, Restianto, Bawono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur dan Sopomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta
- Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Kinasih, 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Kabupaten Sragen)*. Artikel Ilmiah Universitas Muhamdiyah Surakarta Tahun 2013.
- Kusumawati, Eny. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Study Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar)*. Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB Universitas Muhamdiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayasari, Rosalina, 2012. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Informasi Ekonomi dan Akuntansi (JENIUS) Universitas Tridinanti Palembang Vol.2 No.1 2012
- Noerdiawan. D., Putra, L.S., Rahmawati, M.200. *Akuntansi Pemerintahan* .Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pramita dan Andriyani, 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto Universitas Jendral Soedirman Tahun 2010
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia.2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.Jakarta
- Robbins, S. P, dan Timothy A. J. 2014. *Perilaku Organisasi, Organizational Behaviour Buku Terjemahan Edisi 16*. Jakarta : Gramedia
- Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 2014. *Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Jember Masa Jabatan 2014-2019*. Jember
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana
- Santoso, Singgih.2015. *SPSS 22 From Basic to Expert Skills*. Jakarta: Komputindo
- Sudiarta, Sulindawati dan Sujana 2014. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiris pada Lembaga DPRD*

Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume: 2 No. 1 Tahun 2014

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Sopannah dan Wahyudi, I. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Widya Gama Malang Corruption Watch (MCW).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta

Sujarweni, 2015: *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sunyoto, 2012. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS

Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF

Veronica, 2008. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Slack Anggaran pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung*. Universitas Udayana Bali

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu

di Tempat

Hal : Permohonan untuk menjadi responden

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Jember, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuisioner.

Jawaban dari kuisioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember)”**.

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan. Atas kesediaannya dalam mengisi kuisioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Jember, 2015

Yang membuat pernyataan,

Rengki Ramang H

120810301060

Identitas Responden (Dewan)

Mohon di isi dengan memberikan tanda centang (✓) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama: (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

3. Usia : Tahun

4. Jabatan di DPRD:

Ketua DPRD

Wakil Ketua

Anggota Komisi Jabatan di komisi

Anggota Fraksi Jabatan di fraksi

5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. menjadi anggota DPRD.

1 Periode >1 Periode

6. Strata pendidikan:

SLTA/Sederajat DI D2 D3 D4 SI S2

S3 Lainnya

Petunjuk Pengisian Kuisisioner :

Mohon di isi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kuisisioner .

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KUISIONER

PENGETAHUAN ANGGARAN (X)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Dewan mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD					
2	Jika terjadi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan proyek pembangunan dewan sulit mengidentifikasi					
3	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat dewan pahami					
4	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, dewan mengetahui.					
5	Praktik pelaksanaan APBD dilapangan ternyata sungguh sangat berbeda dan banyak yang tidak sesuai					
6	Dewan mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci.					
7	Dewan tidak mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD.					

KOMITMEN ORGANISASI (Z)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Anda sebagai anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan lembaga DPRD tempat Anda bekerja.					
2	Lembaga DPRD di tempat Anda bekerja sebagai anggota dewan sangat berarti bagi Anda					
3	Anda sebagai anggota dewan merasa masalah di dalam lembaga DPRD tempat Anda bekerja juga seperti masalah Anda.					
4	Anda sebagai anggota dewan mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan lembaga DPRD di tempat Anda bekerja					
5	Anda sebagai anggota dewan saat ini masih tetap bertahan dalam lembaga DPRD tempat Anda bekerja karena komitmen dan loyalitas Anda sebagai anggota dewan terhadap badan legislatif.					

PENGAWASAN APBD (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Saya tidak seberapa berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD					
3	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
4	Saya terlibat dalam pengesahan APBD					
5	Dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disahkan					
6	Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas Transparansi					
7	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					
8	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif					
9	Saya meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota					
10	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan					
11	Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Bupati/Walikota					

STATISTIK DESKRIPTIF DATA RESPONDEN

Statistics

	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Fraksi	Periode	Strata Pendidikan
N Valid	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	24	80,0	80,0	80,0
P	6	20,0	20,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 26,00	1	3,3	3,3	3,3
30,00	1	3,3	3,3	6,7
31,00	1	3,3	3,3	10,0
38,00	2	6,7	6,7	16,7
39,00	1	3,3	3,3	20,0
43,00	3	10,0	10,0	30,0
44,00	4	13,3	13,3	43,3
45,00	2	6,7	6,7	50,0
47,00	3	10,0	10,0	63,3
48,00	1	3,3	3,3	66,7
49,00	1	3,3	3,3	70,0
50,00	2	6,7	6,7	76,7
51,00	1	3,3	3,3	80,0
52,00	2	6,7	6,7	86,7
55,00	1	3,3	3,3	90,0
57,00	1	3,3	3,3	93,3

58,00	1	3,3	3,3	96,7
60,00	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Anggota Komisi A	2	6,7	6,7	6,7
Anggota Komisi B	4	13,3	13,3	20,0
Anggota Komisi C	8	26,7	26,7	46,7
Anggota Komisi D	3	10,0	10,0	56,7
Ketua Komisi A	1	3,3	3,3	60,0
Ketua Komisi B	1	3,3	3,3	63,3
Ketua Komisi C	1	3,3	3,3	66,7
Ketua Komisi D	1	3,3	3,3	70,0
Sekretaris Komisi A	1	3,3	3,3	73,3
Sekretaris Komisi B	1	3,3	3,3	76,7
Sekretaris Komisi C	1	3,3	3,3	80,0
Wakil Ketua DPRD	2	6,7	6,7	86,7
Wakil Ketua Komisi A	1	3,3	3,3	90,0
Wakil Ketua Komisi B	1	3,3	3,3	93,3
Wakil Ketua Komisi C	1	3,3	3,3	96,7
Wakil Ketua Komisi D	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Fraksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Fraksi Amanat Pembangunan	3	10,0	10,0	33,3
Fraksi Gerindra	4	13,3	13,3	96,7
Fraksi Golkar	4	13,3	13,3	96,7
Fraksi Partai Harkat	4	13,3	13,3	96,7
Fraksi PKS	4	13,3	13,3	96,7
Fraksi Partai Nasdem	2	6,7	6,7	53,3
Fraksi PDI Perjuangan	6	20,0	20,0	73,3
Fraksi PKB	3	10,0	10,0	83,3
Total	30	100,0	100,0	

Periode

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	15	50,0	50,0	50,0
2,00	15	50,0	50,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Strata Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	20	66,7	66,7	66,7
S2	9	30,0	30,0	96,7
S3	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

STATISTIK DESKRIPTIF JAWABAN RESPONDEN

Variabel X

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	30	4,00	5,00	4,3000	,46609
VAR00002	30	1,00	5,00	3,3667	,96431
VAR00003	30	2,00	5,00	3,9333	,69149
VAR00004	30	2,00	5,00	3,7333	,86834
VAR00005	30	1,00	5,00	3,1333	1,13664
VAR00006	30	2,00	5,00	3,4333	,97143
VAR00007	30	2,00	5,00	3,2000	1,12648
Valid N (listwise)	30				

Variabel Z

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	30	2,00	5,00	4,1333	,93710
VAR00002	30	2,00	5,00	4,1000	,84486
VAR00003	30	2,00	5,00	3,5333	1,10589
VAR00004	30	2,00	5,00	3,9667	,76489
VAR00005	30	2,00	5,00	3,9667	,71840
Valid N (listwise)	30				

Variabel Y

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	30	2,00	5,00	4,1000	,95953
VAR00002	30	2,00	5,00	3,7000	1,02217
VAR00003	30	1,00	5,00	4,2000	,88668
VAR00004	30	2,00	5,00	3,9667	,76489
VAR00005	30	1,00	5,00	3,5667	1,10433
VAR00006	30	1,00	5,00	4,0667	,82768
VAR00007	30	1,00	5,00	4,0667	,94443

VAR00008	30	2,00	5,00	4,2333	,62606
VAR00009	30	1,00	5,00	3,7000	1,02217
VAR00010	30	1,00	5,00	4,2000	,76112
VAR00011	30	4,00	5,00	4,3333	,47946
Valid N (listwise)	30				

Keterangan:**X : Pengetahuan Dewan tentang Anggaran****Z : Komitmen Organisasi****Y : Pengawasan Keuangan Daerah**

Variabel X (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran)

Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Total X
X1	Pearson Correlation	1	-,100	,420*	,034	,182	,465**	,210	,411*
	Sig. (2-tailed)		,600	,026	,858	,335	,010	,265	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	-,100	1	,018	-,250	,772**	-,102	,121	,437*
	Sig. (2-tailed)	,600		,928	,183	,000	,592	,525	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,420*	,018	1	,327	,120	,254	,315	,543**
	Sig. (2-tailed)	,026	,928		,089	,544	,192	,102	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	,034	-,250	,327	1	-,137	,019	,268	,384*
	Sig. (2-tailed)	,858	,183	,089		,469	,920	,152	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson Correlation	,182	,772**	,120	-,137	1	,133	,086	,590**
	Sig. (2-tailed)	,335	,000	,544	,469		,483	,651	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X6	Pearson Correlation	,465**	-,102	,254	,019	,133	1	,296	,463*
	Sig. (2-tailed)	,010	,592	,192	,920	,483		,112	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X7	Pearson Correlation	,210	,121	,315	,268	,086	,296	1	,658**
	Sig. (2-tailed)	,265	,525	,102	,152	,651	,112		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Total X	Pearson Correlation	,411*	,437*	,543**	,384*	,590**	,463*	,658**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Z (Komitmen Organisasi)

Correlations

		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Total Z
Z1	Pearson Correlation	1	,331	,528**	,199	-,044	,667**
	Sig. (2-tailed)		,074	,003	,292	,816	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Z2	Pearson Correlation	,331	1	,384*	,272	,290	,693**
	Sig. (2-tailed)	,074		,036	,146	,120	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Z3	Pearson Correlation	,528**	,384*	1	,307	,153	,789**
	Sig. (2-tailed)	,003	,036		,099	,418	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Z4	Pearson Correlation	,199	,272	,307	1	,312	,606**
	Sig. (2-tailed)	,292	,146	,099		,094	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Z5	Pearson Correlation	-,044	,290	,153	,312	1	,462*
	Sig. (2-tailed)	,816	,120	,418	,094		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total Z	Pearson Correlation	,667**	,693**	,789**	,606**	,462*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y10	Pearson Correlation	,113	,213	,041	,426*	,230	,151	,728**	,356	,213	1	,567**	,541**
	Sig. (2-tailed)	,551	,259	,830	,019	,222	,435	,000	,058	,259		,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y11	Pearson Correlation	,300	,281	,162	,125	,478**	,034	,221	,297	,281	,567**	1	,500**
	Sig. (2-tailed)	,107	,132	,392	,509	,008	,862	,249	,117	,132	,001		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total Y	Pearson Correlation	,701**	,782**	,578**	,523**	,620**	,667**	,674**	,556**	,655**	,541**	,500**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas**Variabel X (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,710	8

Varibel Z (Komitmen Organisasi)**Reliability Statistics**

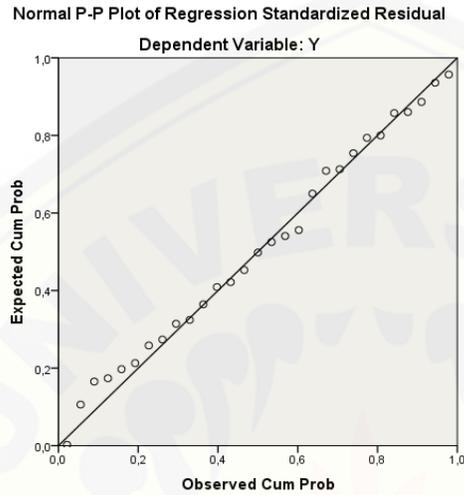
Cronbach's Alpha	N of Items
,758	6

Variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,870	12

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Residual



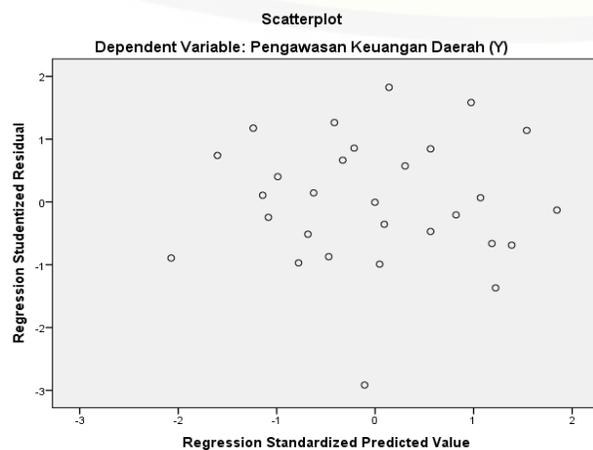
b. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,000	,191		,003	,998		
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X)	,209	,220	,187	,951	,350	,941	1,063
Komitmen Organisasi (Z)	,105	,196	,105	,537	,596	,941	1,063

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

c. Hasil Uji Heteroskeditas



Hasil Analisis Regresi

a. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,562	8,462		6,448	,000
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X)	,415	,334	,229	4,643	,024

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,239 ^a	,257	,236	6,17445

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	62,123	4	31,061	8,150	,003 ^b
Residual	1029,344	26	38,124		
Total	1091,467	30			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X

b. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,173	78,695		4,409	,000
Pengetahuan tentang Anggaran (X)	,565	2,990	,311	6,189	,023
Komitmen Organisasi (Z)	,515	3,269	,453	4,280	,029
Interaksi Pengetahuan Dewan dengan Komitmen Organisasi (XZ)	,402	,124	,795	4,325	,018

a. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,246 ^a	,261	,268	6,27936

a. Predictors: (Constant), XZ, VAR00002, VAR00001

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	66,278	4	22,093	7,822	,046 ^b
Residual	1025,188	26	39,430		
Total	1091,467	30			

a. Dependent Variable: VAR00003

b. Predictors: (Constant), XZ, VAR00002, VAR00001

Rekapitulasi Jawaban Responden

No Responden	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran							JUMLAH
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	5	2	4	4	2	5	5	27
2	5	1	5	5	1	5	5	27
3	4	2	2	4	1	2	2	17
4	4	2	4	4	2	2	2	20
5	4	4	4	4	3	3	4	26
6	4	4	4	4	2	4	5	27
7	4	3	4	4	2	2	2	21
8	4	4	4	4	2	2	2	22
9	5	2	4	2	2	4	2	21
10	4	4	4	4	4	3	4	27
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	4	4	4	4	4	2	4	26
13	4	4	4	5	4	4	2	27
14	5	4	5	4	4	5	5	32
15	4	4	4	2	4	4	2	24
16	4	2	4	4	2	3	3	22
17	5	4	4	5	5	4	3	30
18	4	4	3	2	4	4	3	24
19	4	2	3	4	2	4	2	21
20	5	4	2	2	4	4	2	23
21	4	4	4	3	3	4	2	24
22	5	4	4	4	4	2	4	27
23	4	4	5	4	4	4	4	29
24	4	3	4	4	2	3	3	23
25	4	3	4	4	4	3	3	25
26	4	3	4	4	3	3	3	24
27	4	4	4	4	4	4	5	29
28	4	5	4	2	4	2	4	25
29	4	3	4	4	3	4	3	25
30	5	4	5	4	5	4	2	29

No Responden	Komitmen Organisasi					JUMLAH
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	
1	5	4	5	5	5	24
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	5	4	4	21
4	5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	5	2	4	5	20
7	4	4	2	3	4	17
8	4	5	2	4	4	19
9	2	4	2	5	5	18
10	5	5	4	4	4	22
11	2	4	4	4	4	18
12	4	4	4	2	4	18
13	2	4	2	4	4	16
14	5	5	4	4	4	22
15	4	2	2	2	4	14
16	5	4	4	4	3	20
17	4	2	2	4	2	14
18	5	4	4	5	4	22
19	3	4	2	3	3	15
20	5	5	4	4	2	20
21	3	2	2	4	4	15
22	5	5	3	4	4	21
23	4	5	5	3	4	21
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	5	5	4	23
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	5	4	4	4	4	21
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	4	5	5	24

No Responden	Pengawasan APBD											
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	JUMLAH
1	5	2	4	4	4	4	2	5	2	4	5	41
2	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	49
3	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	47
4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	42
5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	49
6	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
7	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
9	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	42
10	4	2	5	4	1	4	4	4	1	4	4	37
11	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
14	4	4	5	2	4	4	2	2	4	1	4	36
15	2	2	4	2	4	2	4	4	4	5	5	38
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	47
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
20	4	4	5	4	2	4	5	4	2	4	4	42
21	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	46
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
23	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	43
24	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	50
25	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	51
26	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	48
27	5	4	5	5	2	4	4	4	4	4	4	45
28	2	2	1	4	2	1	1	4	1	4	4	26
29	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
30	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	46

No Responden	Variabel Penelitian			
	Total X	Total Z	Total Y	Total X*Z
1	27	24	41	576
2	27	25	49	525
3	17	21	47	483
4	20	21	42	504
5	26	20	49	540
6	27	20	38	580
7	21	17	53	391
8	22	19	55	475
9	21	18	42	432
10	27	22	37	638
11	29	18	40	450
12	26	18	42	450
13	27	16	55	464
14	32	22	36	704
15	24	14	38	336
16	22	20	44	440
17	30	14	47	420
18	24	22	44	528
19	21	15	46	315
20	23	20	42	460
21	24	15	46	360
22	27	21	44	567
23	29	21	43	609
24	23	20	50	460
25	25	23	51	575
26	24	20	48	480
27	29	20	45	580
28	25	21	26	525
29	25	20	38	500
30	29	24	46	696

Lampiran 7

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Fraksi	Periode Kerja	Strata Pendidikan
1	Dr. NNP. Martini G, SE, MM	P	49	Wakil Ketua DPRD	Fraksi PDI Perjuangan	1	S3
2	dr. Yuli Priyanto	L	45	Wakil Ketua DPRD	Fraksi PKS	2	S1
3	Mashuri Harianto, SP	L	43	Ketua Komisi A	Fraksi PKS	1	S1
4	Agus Widiyanto, SE	L	51	Wakil Ketua Komisi A	Fraksi Amanat Pembangunan	2	S1
5	Lukman Winarno, SS	L	44	Sekretaris Komisi A	Fraksi PDI Perjuangan	2	S1
6	Ambar Listiyani, SH	P	52	Anggota Komisi A	Fraksi Parta Demokrat	2	S1
7	Marduwan, S.HI	L	52	Anggota Komisi A	Fraksi Gerindra	1	S1
8	Bukri, S.Pd	L	47	Ketua Komisi B	Fraksi PDI Perjuangan	2	S1
9	Drs. Masduki	L	55	Wakil Ketua Komisi B	Fraksi Partai Gerindra	2	S1
10	M. Kholil Asyari, S.Ag, M.Pd.I	L	44	Sekretaris Komisi B	Fraksi Partai Golkar	2	S2
11	Drs. H. Masrur, M.Si	L	50	Anggota Komisi B	Fraksi Partai Hanura	2	S2
12	Sunarsi Khoris, S.Pd, M.Si	P	44	Anggota Komisi B	Fraksi PKB	1	S2
13	H. Nanang M. Nasir, SH	L	48	Anggota Komisi B	Fraksi PKS	2	S1
14	Danang Kurniawan, SE, M.Si	L	30	Anggota Komisi B	Fraksi PDI Perjuangan	1	S2
15	Siswono, S.IP	L	57	Ketua Komisi C	Fraksi Partai Gerindra	1	S1
16	Anang Murwanto, S.Sos	L	43	Wakil Ketua Komisi C	Fraksi Partai Demokrat	2	S1
17	Tatin Indrayani, SE, M.Si	P	31	Sekretaris Komisi C	Fraksi PKB	1	S2

Lampiran 7

18	Suyitno, SE	L	60	Anggota Komisi C	Fraksi Golkar	1	S1
19	HR.Fatchurrniawan,S.IP,MM	L	38	Anggota Komisi C	Fraksi Parta Golkar	1	S2
20	Ikkal Wilda Fardana, SH	L	26	Anggota Komisi C	Fraksi PPP	1	S1
21	Winti Isnaini, S.Ag, M.Pd.I	P	43	Anggota Komisi C	Fraksi Partai Nasdem	1	S2
22	Drs. Bambang Hariyanto	L	47	Anggota Komisi C	Fraksi Partai Nasdem	1	S1
23	HM. Hasan Basuki, SH	L	58	Anggota Komisi C	Fraksi Partai Gerindra	1	S1
24	H. Mangkubudi Heri W, SP	L	38	Anggota Komisi C	Fraksi PKS	1	S1
25	Iwan Suyitno, SE	L	39	Anggota Komisi C	Fraksi PDI Perjuangan	2	S1
26	Mochammad Hafidi, S.Sos	L	47	Ketua Komisi D	Fraksi PKB	2	S1
27	Yudi Hartono, SE	L	46	Wakil Ketua Komisi D	Fraksi Partai Golkar	2	S1
28	Isa Mahdi, ST, M.Sc	L	44	Anggota Komisi D	Fraksi Partai Hanura	1	S2
29	Lilik Niamah, STP, M.Si	P	45	Anggota Komisi D	Fraksi PAN	2	S2
30	Drs. Agus Sufyan	L	50	Anggota Komisi D	Fraksi PDI Perjuangan	2	S1